



Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023

Anggoro Adji Widodo

Universitas Bina Sarana Informatika

Dwi Ajeng Riyanti

Universitas Bina Sarana Informatika

Firda Rahma Dani

Universitas Bina Sarana Informatika

Meila Eka Abdillah

Universitas Bina Sarana Informatika

Sonny Fransisco Siboro

Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl. Dewi Sartika No.289 4, Cawang, Kec.Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Korespondensi penulis: 63220745@bsi.ac.id*

Abstrak. *One of the most critical components in regional governance is local government finance. District or city governments are required to submit reports on their financial accountability to evaluate their performance in carrying out their duties. A tool that can be used to assess the financial performance of local governments is by calculating financial ratios from the budget realization reports. This study aims to analyze whether the budget realization performance aligns with the established development goals and priorities and to detect potential deviations or wasteful spending in the DKI Jakarta province during the 2021–2023 period. The data used is secondary data sourced from the annual financial reports of the DKI Jakarta Provincial Government from 2021 to 2023. The method applied is quantitative descriptive analysis, focusing on the Budget Realization Report (LRA) found in the Regional Government Financial Report (LKPD) of the DKI Jakarta Province, particularly in the expenditure analysis aspect. The research results indicate that the financial performance has an independence ratio categorized as participatory, an effectiveness ratio categorized as fairly effective, an efficiency ratio categorized as less efficient. Therefore, it is recommended that the DKI Jakarta Provincial Government allocate regional spending proportionally, explore the potential of regional original income, and enhance supervision over the use of the State Budget (APBD).*

Keywords: *local government financial performance; effectiveness ratio of regional original income; regional financial efficiency ratio.*

Abstrak. Salah satu komponen terpenting dalam menjalankan pemerintahan di daerah adalah keuangan daerah. Pemerintah kabupaten atau kota diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah mereka agar kinerja mereka dalam menjalankan tugas dapat dievaluasi. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menghitung rasio keuangan dari laporan realisasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja realisasi anggaran yang digunakan telah sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dan mendeteksi potensi penyimpangan atau pemborosan pada provinsi DKI Jakarta selama periode 2021-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2021 hingga 2023. Metode yang diterapkan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yang berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam aspek analisis belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangannya memiliki rasio kemandirian dikategorikan partisipatif, rasio efektivitas

dikategorikan cukup efektif, rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan belanja daerah secara proporsional, menggali potensi penerimaan asli daerah dan peningkatan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Kata Kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah; rasio efektivitas pendapatan asli daerah; rasio efisiensi keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan instrumen penting dalam sistem akuntansi pemerintah yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Laporan ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan suatu entitas pemerintahan.

Pemerintah DKI Jakarta, sebagai Ibu Kota sekaligus pusat perekonomian dan pemerintahan Indonesia, memiliki anggaran dengan skala yang besar dan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala melakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran guna mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Analisis semacam ini tidak hanya memberikan gambaran tentang seberapa baik anggaran direalisasikan, tetapi juga mengindikasikan seberapa optimal sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tahun 2021 hingga 2023 merupakan periode yang strategis untuk dianalisis karena mencakup masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Selama periode ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam mengelola keuangan secara efisien sambil tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kajian terhadap Laporan Realisasi Anggaran dalam rentang waktu tersebut menjadi relevan dan penting untuk mengetahui apakah kebijakan fiskal yang diambil telah menghasilkan kinerja keuangan yang baik.

Melalui jurnal ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan daerah. Penilaian kinerja keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan efektif di masa mendatang.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA disusun untuk menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, khususnya terkait dengan kesesuaian antara anggaran dan realisasinya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (dalam Wardhani, 2021, p. 17) kinerja keuangan adalah analisis untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menerapkan standar aturan keuangan di dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Menurut Mahsun (2013), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan program dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan pemerintah daerah. Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan daerah dapat dinilai dari kemampuan daerah dalam:

- Meningkatkan PAD
- Mengontrol belanja daerah
- Mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien
- Menjaga keseimbangan fiskal

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jenis - Jenis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (PAD)

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio yang mengukur dan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase (%)	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019)

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan bagaimana perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Ketika rasio pemungutan pendapatan pemerintah daerah kurang dari seratus persen, hal ini dianggap efisien. Kinerja yang dicapai semakin baik jika rasio efisiensi semakin rendah. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas upaya pemungutan pendapatan, pemerintah daerah harus menghitung secara cermat jumlah total biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima (Halim, 2012).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90 - 100	Kurang Efisien
80 - 90	Cukup Efisien
60 - 80	Efisien

< 60	Sangat Efisien
------	----------------

Sumber : Halim (2012)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Dengan tujuan untuk menganalisis realisasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 - 2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi laporan keuangan tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran dalam satu periode. LRA berisi tentang rincian pendapatan, transfer, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah koreksi dan penyesuaian. Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021:

Tabel 3. Laporan Realisasi dan Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630
Pendapatan Transfer	16.873.544.789.828	22.673.794.344.052
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	3.153.473.000.000	1.286.907.449.318
Jumlah Pendapatan	65.209.105.040.795	65.567.009.199.000
Belanja Operasi	57.799.906.974.328	53.925.743.776.335
Belanja Modal	8.761.139.729.965	6.865.827.016.719
Belanja Tak Terduga	3.043.969.206.971	439.889.457.199
Jumlah Belanja	69.605.015.911.264	61.231.460.250.253
Transfer/Bantuan Keuangan	387.604.963.312	387.579.910.312
Jumlah Belanja dan Transfer	69.992.620.874.576	61.619.040.160.565
Surplus/Defisit	- 4.783.515.833.781	3.947.969.038.435
Penerimaan Pembiayaan	14.681.130.860.452	11.914.196.646.991
Pengeluaran Pembiayaan	9.897.615.026.671	6.140.446.854.085
Pembiayaan Netto	4.783.515.833.781	5.773.749.792.906
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		9.721.718.831.341

Sumber : PPID Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 45.182.087.250.967 dapat direalisasikan sebesar Rp 41.606.307.4405.630 atau 92,09%. Jumlah belanja dan transfer yang direncanakan sebesar Rp 69.992.620.874.576 dapat direalisasikan sebesar Rp 61.619.040.160.565. Maka dari itu terjadi defisit pada anggaran sebesar Rp

(4.783.515.833.781) yang realisasinya surplus sebesar Rp 3.947.969.038.435. Pembiayaan netto yang direncanakan Rp 4.783.515.833.781 dapat direalisasikan sebesar Rp 5.773.749.792.906. Sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 9.721.718.831.341.

Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2022 :

Tabel 4. Laporan Realisasi dan Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501
Pendapatan Transfer	17.226.478.703.801	18.860.858.779.549
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	4.907.334.270.908	2.821.215.663.258
Jumlah Pendapatan	77.796.647.728.301	67.290.479.172.308
Belanja Operasi	58.971.570.881.413	55.542.186.969.752
Belanja Modal	10.800.988.472.312	8.808.194.842.704
Belanja Tak Terduga	6.714.844.382.393	29.976.747.630
Jumlah Belanja	76.487.403.736.118	64.380.358.560.086
Transfer/Bantuan Keuangan	484.762.660.210	484.762.660.210
Jumlah Belanja dan Transfer	76.972.166.396.328	64.865.121.220.296
Surplus/Defisit	824.481.331.973	2.425.357.952.012
Penerimaan Pembiayaan	5.015.108.618.305	10.701.364.203.815
Pengeluaran Pembiayaan	5.839.589.950.278	4.526.625.491.573
Pembiayaan Netto	- 824.481.331.973	6.174.738.712.242
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		8.600.096.664.254

Sumber : PPID Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 77.796.647.728.301 dapat direalisasikan sebesar Rp 67.290.479.172.308 atau 81,94%. Jumlah belanja dan transfer yang direncanakan sebesar Rp 76.972.166.396.328 dapat direalisasikan sebesar Rp 64.865.121.220.296. Maka dari itu terjadi surplus pada anggaran sebesar Rp 824.481.331.973 yang dapat direalisasikan sebesar Rp 2.425.357.952.012. Pembiayaan netto yang direncanakan Rp (824.481.331.973) dapat direalisasikan sebesar Rp 6.174.738.712.242. Sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 8.600.096.664.254.

Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023 :

Tabel 5. Laporan Realisasi dan Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	48.442.043.648.831	49.139.745.715.234

*Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023*

Pendapatan Transfer	20.224.315.057.470	20.159.634.672.034
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	1.996.577.429.044	1.766.153.820.454
Jumlah Pendapatan	70.662.936.135.345	71.065.534.207.722
Belanja Operasi	60.383.693.518.412	57.556.903.079.616
Belanja Modal	10.850.183.726.006	8.857.260.068.298
Belanja Tak Terduga	554.562.887.668	-
Jumlah Belanja	71.788.440.132.086	66.414.163.147.914
Transfer/Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500
Jumlah Belanja dan Transfer	72.144.886.612.586	66.770.609.628.414
Surplus/Defisit	- 1.481.950.477.241	4.294.924.579.308
Penerimaan Pembiayaan	8.895.317.655.192	8.886.564.884.056
Pengeluaran Pembiayaan	7.413.367.177.951	6.639.068.343.295
Pembiayaan Netto	1.481.950.477.241	2.247.496.540.761
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		6.542.421.120.069

Sumber : PPID Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 70.662.936.135.345 dapat direalisasikan sebesar Rp 71.065.534.207.722 atau 101,44%. Jumlah belanja dan transfer yang direncanakan sebesar Rp 72.144.886.612.586 dapat direalisasikan sebesar Rp 66.770.609.628.414. Maka dari itu terjadi defisit pada anggaran sebesar Rp (1.481.950.477.241) yang realisasinya surplus sebesar Rp 4.294.924.579.308. Pembiayaan netto yang direncanakan Rp 1.481.950.477.241 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.247.496.540.761. Sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 6.542.421.120.069.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut adalah perhitungan berdasarkan rumus Efektivitas PAD :

2021 :	$\frac{41.606.307.405.630}{45.182.087.250.967}$	X	100%	=	92,09%
2022 :	$\frac{45.608.404.729.501}{55.662.834.753.592}$	x	100%	=	81,94%
2023 :	$\frac{49.139.745.715.234}{48.442.043.648.831}$	x	100%	=	101,44%

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Keterangan
2021	41.606.307.405.630	45.182.087.250.967	92,09%	Cukup Efektif
2022	45.608.404.729.501	55.662.834.753.592	81,94%	Kurang Efektif
2023	49.139.745.715.234	48.442.043.648.831	101,44%	Sangat Efektif

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efektivitas pada tahun 2021 sebesar 92,09% dan dikategorikan cukup efektif, yang artinya DKI Jakarta telah mencapai sebagian tujuan yang telah ditargetkan meskipun masih ada hal yang harus diperbaiki atau tidak mencapai tingkat optimal yang diinginkan. Pada tahun 2022, rasio efektivitasnya menurun menjadi 81,94% dan dikategorikan kurang efektif, yang artinya realisasi pendapatan belum mencapai target yang optimal, sehingga perlu ada upaya peningkatan dalam pemungutan dan pengelolaan PAD. Pada tahun 2023, rasio efektivitas naik menjadi 101,44% dan dikategorikan sangat efektif, yang artinya DKI Jakarta berhasil merealisasikan pendapatan asli daerahnya mendekati target yang ditetapkan, serta menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan pendapatannya.

Rasio Efisiensi

Berikut adalah perhitungan berdasarkan rumus Efisiensi :

2021 :	$\frac{61.619.040.160.565}{65.567.009.199.000}$	x	100%	=	93,98%
2022 :	$\frac{64.865.121.220.296}{67.290.479.172.308}$	x	100%	=	96,40%
2023 :	$\frac{66.770.609.628.414}{71.065.534.207.722}$	x	100%	=	93,96%

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Keterangan
2021	61.619.040.160.565	65.567.009.199.000	93,98%	Kurang Efisien

2022	64.865.121.220.296	67.290.479.172.308	96,40%	Kurang Efisien
2023	66.770.609.628.414	71.065.534.207.722	93,96%	Kurang Efisien

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio efisiensi pada tahun 2021 – 2023 dinilai kurang efektif yaitu pada tahun 2021 sebesar 93,98%, tahun 2022 sebesar 96,40% dan tahun 2023 sebesar 93,96%. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang digunakan tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga belanja daerah yang dikeluarkan hampir mencapai pendapatan daerah yang di dapatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan belanja daerah dengan menyesuaikannya dengan kemampuan pendapatan daerah yang ada. Sehingga akan terjadinya peningkatan efisiensi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2021 hingga 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai kinerja keuangan daerah. Secara umum, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, efektivitas PAD tercatat sebesar 92,09% dan berada pada kategori “cukup efektif”, yang mengindikasikan bahwa pendapatan yang direalisasikan hampir mendekati target meskipun belum optimal. Dan tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan pada kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 81,94% untuk itu dapat dikategorikan “kurang efektif”, yang mencerminkan adanya hambatan dalam pencapaian target PAD. Namun, pada tahun 2023 mencatatkan adanya peningkatan yang signifikan dengan nilai efektivitas sebesar 101,44%, dapat dikategorikan sebagai “sangat efektif”, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan strategi pengelolaan dan pemungutan PAD pada tahun tersebut.

Namun demikian, dari sisi efisiensi pengeluaran daerah, kinerja selama tiga tahun berturut - turut belum menunjukkan signifikan. Rasio efisiensi belanja daerah tercatat sebesar 93,98% pada tahun 2021, meningkat menjadi 96,40% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 93,96% pada tahun 2023. Ketiganya masih berada pada kategori “kurang efisien”, yang menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasional pemerintah dan pembangunan daerah masih tergolong tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pemborosan atau belum optimalnya pada penggunaan anggaran. serta perlunya pengendalian yang lebih ketat lagi terhadap aktivitas belanja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka adanya beberapa saran strategis dapat diberikan sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pola belanja yang selama ini telah dilakukan, dengan menekankan pada efisiensi dan

efektivitas program yang didanai melalui APBD. Optimalisasi penganggaran berbasis kinerja dan hasil (performance-based budgeting) dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Kedua, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pengelolaan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembenahan regulasi yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Ketiga, pengawasan dan kontrol internal terhadap pelaksanaan anggaran perlu diperkuat dengan melibatkan Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi publik melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup tiga indikator keuangan utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah indikator analisis, seperti rasio pertumbuhan, rasio keserasian, serta membandingkan kinerja antar provinsi guna untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami penulis menyampaikan terima kasih Kepada Universitas Bina Sarana Informatika atas dukungannya selama proses penyusunan artikel ini. Tidak lupa, penulis menghargai kontribusi semua pihak yang terlibat penyediaan data, khususnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyediakan akses terhadap laporan keuangan tahunan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Artikel ini merupakan bagian dari tugas akhir kelompok dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Segala masukan dan kritik konstruktif dari pembaca sangat di harapkan demi perbaikan kualitas penelitian ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhabsi, R.H. Priyono, N. & Bharata, R.W. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2020. *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 1(2), 212-222. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.523>.
- Sumenge, AS. (2013). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, *Jurnal EMBA*, 1(3):74-81
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.6772/72>

- Medindari, K.N.A.A. Arianto, H.Y. Wahyuni, C. & Mulyani, A.D. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *JRA: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 4(1), 63-72. <https://doi.org/10.29313/jra.v4i1.4244>.
- Pebriani, L.E. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Dalam Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja Tahun 2016-2018. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 48-53. <https://doi.org/10.23887/vjra.v8i2.21722>.
- Fahlevi, H. & Ananta, M.R. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *JIAP: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 37-44.
- Syahputra, A. A., & Rahmat, M. (2021). Analisis efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(1), 46-58. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/890>
- Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan, edisi pertama. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2019). Buku analisis laporan keuangan pemerintah daerah. STIM YPKN.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Samlemba Empat.
- PPID. (2021). Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 *Audited*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>.
- PPID. (2022). Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 *Audited*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>.
- PPID. (2023). Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 *Audited*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>.